

RENJA

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2019



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO**

JL. Urip Sumoharjo no. 6 Purworejo 54111 Telp/Fax (0275) 325202

KATA PENGANTAR

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo.

Dengan mendukung Visi, Misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purworejo, Visi "Terwujudnya Kabupaten Purworejo yang Semakin Sejahtera Berbasis Pertanian, Pariwisata, Industri dan Perdagangan yang Berwawasan Budaya, Lingkungan dan Ekonomi Kerakyatan". Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo mendukung Misi Bupati Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purworejo Salah satunya :

Misi "Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai gerbang ekonomi utama bagian selatan Provinsi Jawa Tengah yang berbasis Pariwisata, Pertanian, industri dan Perdagangan.

Menjadikan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo sebagai lembaga yang menyelenggarakan tugas urusan Pemerintah bidang penanaman modal sesuai dengan kewenangan Daerah yang meliputi penanaman modal, perizinan dan data, sistem informasi dan pengaduan telah menyusun rencana kerja tahun 2019 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo tahun 2016 – 2021, Renstra dan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo.

Dalam Rencana Kerja tahun 2019 menyajikan rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya serta informasi tentang rencana capaian kinerja dan rancangan dana indikatif yang dibutuhkan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kondisi keuangan Daerah.

Purworejo, Juli 2018

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purworejo

WIDYO PRAYITNO, S.H

Pembina Utama Muda
NIP. 19620227 198903 1 007

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja (Renja) ini merupakan dokumen rencana kerja tahunan Organisasi Perangkat Daerah yang mengacu pada Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD).

Sebagaimana telah kita ketahui bersama dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo dan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo.

Tema RKPD Tahun 2019 adalah Melanjutkan Pembangunan Menuju Masyarakat Purworejo yang lebih sejahtera berbasis Agrobisnis. Prioritas yang mendukung Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo adalah:

1. Penguatan Perekonomian Daerah yang didukung dengan Ketahanan Pangan, Pengembangan Agrobisnis berbasis Produk unggulan Daerah dan investasi.
2. Tata kelola Pemerintahan yang baik dan kondusifitas daerah serta Pengelolaan Bencana.

Adapun ruang lingkup tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan bidang penanaman modal sesuai dengan kewenangan Daerah yang meliputi penanaman modal, perizinan dan data, sistem informasi dan pengaduan.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunannya, Rencana Kerja DINPMPTSP Tahun 2019 ini berlandaskan pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 tahun 2012 tentang Sistem Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah No 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo;
17. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Renja disusun sebagai dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 1 (satu) tahun dengan berpedoman pada Renstra OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

b. Tujuan

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan Pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan yang akuntabel, partisipatif dan tepat sasaran dalam kurun waktu 1 tahun.
2. Untuk meningkatkan pelayananan kepada masyarakat yang berdaya guna dan berhasil guna mendukung visi dan misi Bupati .

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayananan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo terdiri dari 4 Bab sebagai berikut :

- | | |
|-------|-----------------------|
| BAB I | PENDAHULUAN |
| 1.1 | Latar Belakang |
| 1.2 | Landasan Hukum |
| 1.3 | Maksud dan Tujuan |
| 1.4 | Sistematika penulisan |

BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan OPD
2.3	Isu – Isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
2.4	Review terhadap Rancangan awal OPD
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN
3.1	Telaah terhadap Kebijakan nasional
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja OPD
BAB IV	PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB IV	PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2017

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu

Berdasarkan Renja tahun 2017 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengusulkan 8 (delapan) program dan 31 (tigapuluh satu) kegiatan sebagai berikut :

Program :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5. Program Penyusunan data dasar Pembangunan
6. Program Fasilitasi Penyelenggaraan Energi Sumber Daya Mineral
7. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
8. Program Peningkatan Promosi Investasi

Kegiatan :

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan alat tulis kantor
4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
7. Penyediaan makanan dan minuman
8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
10. Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
11. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
13. Pengadaan Sarpras Kantor
14. Pemeliharaan rutin/berkala komputer, Laptop dan Printer
15. Pengiriman Pelatihan Penanaman Modal dan Perizinan
16. Penyusunan Pelaporan Keuangan
17. Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
18. Review Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan

19. Penyusunan Data Dasar Pembangunan
20. Fasilitasi Sektor Energi
21. Fasilitasi Sektor Sumber Daya Mineral
22. Pelayanan perizinan
23. Intensifikasi Pelayanan Perizinan
24. Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi SIM Perizinan
25. Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
26. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perizinan
27. Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan Satu Atap
28. Promosi dan kerjasama investasi
29. Penyusunan Bahan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal
30. Forum Komunikasi PTSP
31. Pembuatan Audio Visual Potensi dan Profil Investasi

PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN **BELANJA LANGSUNG** APBD TAHUN 2017.

1. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
 - a) Jumlah Anggaran : Rp. 8.469.000,-
 - b) Realisasi Anggaran : Rp. 4.563.300,-
 - c) Kinerja Anggaran : 53,88 %
 - d) Rencana Output : Penyediaan Surat Masuk dan Keluar selama 12 bulan
 - e) Realisasi Output : Tersedianya surat masuk dan keluar selama 12 bulan
 - f) Kinerja Output : 100%
 - g) Permasalahan : Belanja Perangko tidak dimohon karena pengiriman surat melalui jasa kurir dan intranet.
 - h) Solusi : Perencanaan tahun berikutnya akan disesuaikan.

- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
 - a) Jumlah Anggaran : Rp. 45.000.000,-
 - b) Realisasi Anggaran : Rp. 37.340.471,-
 - c) Kinerja Anggaran : 82,98 %
 - d) Rencana Output : Penyediaan rekening langganan telepon, internet, listrik dan air selama 12 bulan.

- e) Realisasi Output : Tersedianya rekening langganan telepon, internet, listrik dan air selama 12 bulan.
 - f) Kinerja Output : 100%
 - g) Permasalahan : Langganan internet baru berjalan dari bulan Agustus – Desember karena bulan Januari – Juli masih dalam proses pembuatan Program Sistem Perizinan Daring yang bekerjasama dengan pihak ke-3.
 - h) Solusi : Penyesuaian pada Perencanaan selanjutnya
- 3) Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
 - a) Jumlah Anggaran : Rp. 11.668.000,-
 - b) Realisasi Anggaran : Rp. 11.658.300,-
 - c) Kinerja Anggaran : 99,92 %
 - d) Rencana Output : Penyediaan Alat Tulis Kantor sebanyak 36 jenis.
 - e) Realisasi Output : Tersedianya Alat Tulis Kantor sebanyak 36 jenis.
 - f) Kinerja Output : 100%
 - g) Permasalahan : -
 - h) Solusi : -
- 4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
 - a) Jumlah Anggaran : Rp. 6.599.900,-
 - b) Realisasi Anggaran : Rp. 6.457.850,-
 - c) Kinerja Anggaran : 97,85 %
 - d) Rencana Output : Penyediaan Kwitansi Dinas selama 12 bulan dan penggandaan sebanyak 12 bulan
 - e) Realisasi Output : Tersedianya Kwitansi Dinas selama 12 bulan dan penggandaan sebanyak 12 bulan
 - f) Kinerja Output : 100%
 - g) Permasalahan : -
 - h) Solusi : -
- 5) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
 - a) Jumlah Anggaran : Rp. 2.863.900,-
 - b) Realisasi Anggaran : Rp. 2.716.100,-
 - c) Kinerja Anggaran : 94,84 %
 - d) Rencana Output : Penyediaan 7 jenis Komponen Instalasi Listrik

- e) Realisasi Output : Tersedianya 7 jenis Komponen Instalasi Listrik
 - f) Kinerja Output : 100%
 - g) Permasalahan : -
 - h) Solusi : -
- 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
 - a) Jumlah Anggaran : Rp. 1.510.000,-
 - b) Realisasi Anggaran : Rp. 1.277.500,-
 - c) Kinerja Anggaran : 84,6%
 - d) Rencana Output : Penyediaan Surat Kabar selama 12 bulan.
 - e) Realisasi Output : Tersedianya Surat Kabar selama 12 bulan.
 - f) Kinerja Output : 100%
 - g) Permasalahan : Pembayaran tagihan sesuai dengan kebutuhan (untuk tagihan bulan Desember baru dibayarkan bulan Januari 2018).
 - h) Solusi : Penyesuaian pada Perencanaan tahun berikutnya
- 7) Penyediaan Makanan dan Minuman
- Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
 - a) Jumlah Anggaran : Rp. 16.039.000,-
 - b) Realisasi Anggaran : Rp. 15.110.315,-
 - c) Kinerja Anggaran : 94,21 %
 - d) Rencana Output : Penyediaan minuman harian pegawai selama 11 bulan.
 - e) Realisasi Output : Tersedianya minuman harian pegawai selama 11 bulan.
 - f) Kinerja Output : 100%
 - g) Permasalahan : Jumlah pegawai yang direncanakan 32 orang baru terisi/terrealisasi pada bulan Juni 2017.
 - h) Solusi : Penyesuaian pada Perencanaan pada berikutnya
- 8) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Provinsi
 - a) Jumlah Anggaran : Rp. 96.640.000,-
 - b) Realisasi Anggaran : Rp. 68.124.585,-
 - c) Kinerja Anggaran : 70,49 %
 - d) Rencana Output : Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah selama 12 bulan.
 - e) Realisasi Output : Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah selama 12 bulan.

- f) Kinerja Output : 100%
 - g) Permasalahan : Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah menyesuaikan undangan yang diterima.
 - h) Solusi : Penyesuaian pada Perencanaan pada berikutnya.
- 9) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
- Lokasi Kegiatan : Purworejo
 - a) Jumlah Anggaran : Rp. 7.810.000,-
 - b) Realisasi Anggaran : Rp. 5.175.000,-
 - c) Kinerja Anggaran : 66,26 %
 - d) Rencana Output : Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah selama 12 bulan.
 - e) Realisasi Output : Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah selama 12 bulan.
 - f) Kinerja Output : 100%
 - g) Permasalahan : Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah menggunakan Kendaraan Dinas sehingga tidak menggunakan dana SPPD dalam daerah.
 - h) Solusi : Penyesuaian pada Perencanaan pada berikutnya.
- 10) Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
- Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
 - a) Jumlah Anggaran : Rp. 1.199.900,-
 - b) Realisasi Anggaran : Rp. 1.198.565,-
 - c) Kinerja Anggaran : 99,89 %
 - d) Rencana Output : Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih sebanyak 10 jenis.
 - e) Realisasi Output : Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih sebanyak 10 jenis.
 - f) Kinerja Output : 100%
 - g) Permasalahan : -
 - h) Solusi : -

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 11) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
 - a) Jumlah Anggaran : Rp. 59.140.000,-
 - b) Realisasi Anggaran : Rp. 56.294.100,-
 - c) Kinerja Anggaran : 95,19 %
 - d) Rencana Output : Pemeliharaan Gedung Kantor seluas 660 m²
 - e) Realisasi Output : Terpeliharanya Gedung Kantor seluas 660 m²

- f) Kinerja Output : 100%
 - g) Permasalahan : -
 - h) Solusi : -
- 12) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
 - a) Jumlah Anggaran : Rp. 28.990.000,-
 - b) Realisasi Anggaran : Rp. 21.762.664,-
 - c) Kinerja Anggaran : 75,07 %
 - d) Rencana Output : Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 sebanyak 2 unit dan Kendaraan Dinas Roda 2 sebanyak 6 unit
 - e) Realisasi Output : Terpeliharanya Kendaraan Dinas Roda 4 sebanyak 2 unit dan Kendaraan Dinas Roda 2 sebanyak 6 unit
 - f) Kinerja Output : 100%
 - g) Permasalahan : Pemeliharaan Kendaraan menyesuaikan kebutuhan/tingkat kerusakan.
 - h) Solusi : Perencanaan tahun berikutnya menyesuaikan data kondisi asset barang/kendaraan.
- 13) Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
- Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
 - a) Jumlah Anggaran : Rp. 50.000.000,-
 - b) Realisasi Anggaran : Rp. 49.090.000,-
 - c) Kinerja Anggaran : 98,18 %
 - d) Rencana Output : Pengadaan Meja kursi kerja 10 set.
 - e) Realisasi Output : Tersedianya Meja Kursi Kerja 10 set.
 - f) Kinerja Output : 100%
 - g) Permasalahan : -
 - h) Solusi : -
- 14) Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
- Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
 - a) Jumlah Anggaran : Rp. 14.475.700,-
 - b) Realisasi Anggaran : Rp. 14.434.500,-
 - c) Kinerja Anggaran : 99,72 %
 - d) Rencana Output : Pemeliharaan 9 unit Komputer, 3 unit Laptop dan 8 unit Printer
 - e) Realisasi Output : Terpeliharanya 9 unit Komputer, 3 unit Laptop dan 8 unit Printer
 - f) Kinerja Output : 100%
 - g) Permasalahan : -
 - h) Solusi : -

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- 15) Pengiriman Pelatihan Penanaman Modal dan Perizinan
- Lokasi Kegiatan : Jateng dan Luar Jateng
 - a) Jumlah Anggaran : Rp. 19.975.000,-
 - b) Realisasi Anggaran : Rp. 16.366.170,-
 - c) Kinerja Anggaran : 81,93 %
 - d) Rencana Output : Pengetahuan dan Ketrampilan petugas tentang Penanaman Modal dan Perizinan meningkat 100%
 - e) Realisasi Output : Meningkatnya Pengetahuan dan Ketrampilan petugas tentang Penanaman Modal dan Perizinan 100%
 - f) Kinerja Output : 100%
 - g) Permasalahan : DPMPTSP Provinsi Jateng tidak mengadakan Diklat sehingga biaya Diklat tidak terealisasi.
 - h) Solusi : Peningkatan Koordinasi dengan DPMPTSP Provinsi Jateng.

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- 16) Penyusunan Pelaporan Keuangan
- Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
 - a) Jumlah Anggaran : Rp. 7.069.900,-
 - b) Realisasi Anggaran : Rp. 6.755.000,-
 - c) Kinerja Anggaran : 95,55 %
 - d) Rencana Output : Penyusunan Laporan Keuangan SKPD (bulanan, triwulan, semesteran, tahunan) sebanyak 19 dokumen
 - e) Realisasi Output : Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD (bulanan, triwulan, semesteran, tahunan) sebanyak 19 dokumen
 - f) Kinerja Output : 100%
 - g) Permasalahan : -
 - h) Solusi : -
- 17) Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
- Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
 - a) Jumlah Anggaran : Rp. 8.835.900,-
 - b) Realisasi Anggaran : Rp. 8.472.200,-
 - c) Kinerja Anggaran : 95,88 %
 - d) Rencana Output : Penyusunan dokumen Renja, RKA,/DPA, LAKIP, LKPJ, DPPA, LPPD sebanyak 10 dokumen.

- e) Realisasi Output : Tersusunnya dokumen Renja, RKA,/DPA, LAKIP, LKPJ, DPPA, LPPD sebanyak 10 dokumen.
 - f) Kinerja Output : 100%
 - g) Permasalahan : -
 - h) Solusi : -
- 18) Review Standart Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan
- Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
 - a) Jumlah Anggaran : Rp. 49.499.000,-
 - b) Realisasi Anggaran : Rp. 45.725.300,-
 - c) Kinerja Anggaran : 92,37 %
 - d) Rencana Output : Penyusunan Perbup. dan SP (Percepatan Perizinan) sebanyak 10 dokumen.
 - e) Realisasi Output : Tersusunnya Perbup. dan SP (Percepatan Perizinan) sebanyak 10 dokumen.
 - f) Kinerja Output : 100 %
 - g) Permasalahan : Perjalanan Dinas Luar Daerah menyesuaikan kebutuhan.
 - h) Solusi : Penyesuaian Perencanaan pada tahun berikutnya.

e. Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan

- 19) Penyusunan Data Dasar Pembangunan
- Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
 - a) Jumlah Anggaran : Rp. 6.599.700,-
 - b) Realisasi Anggaran : Rp. 5.537.600,-
 - c) Kinerja Anggaran : 83,91 %
 - d) Rencana Output : Penyediaan dokumen Data Dasar bidang Penanaman Modal dan Perizinan 1 dokumen.
 - e) Realisasi Output : Tersedianya dokumen Data Dasar bidang Penanaman Modal dan Perizinan 1 dokumen.
 - f) Kinerja Output : 84 %
 - g) Permasalahan : Konsolidasi dan Konfirmasi data belum terlaksana karena Kecamatan belum dapat menyediakan data pada akhir tahun 2017.
 - h) Solusi : Konsolidasi dan Konfirmasi data dilaksanakan pada awal tahun 2018.

2. URUSAN PILIHAN

f. Program Fasilitas Penyelenggaraan Energi Sumber Daya Mineral

20) Fasilitas Sektor Energi

- Lokasi Kegiatan : Kabupaten Purworejo
- a) Jumlah Anggaran : Rp. 32.814.000,-
- b) Realisasi Anggaran : Rp. 22.338.645,-
- c) Kinerja Anggaran : 68,08 %
- d) Rencana Output : Data Informasi Kebutuhan Listrik Pedusunan, KK Miskin yang belum berlistrik, Data Informasi Potensi EBT, Fasilitas Lomba Hemat Energi dan Air
- e) Realisasi Output : Tersajinya Data Informasi Kebutuhan Listrik Pedusunan, KK Miskin yang belum berlistrik 1 dokumen, Data Informasi Potensi EBT 1 dokumen, 2 peserta lomba Hemat Energi dan Air.
- f) Kinerja Output : 73 %
- g) Permasalahan : Tidak ada kegiatan Lomba Hemat Energi dan Air yang dilaksanakan Provinsi/Pusat
- h) Solusi : Kegiatan Energi digabung dengan ESDM.

21) Fasilitas Sektor Sumber Daya Mineral

- Lokasi Kegiatan : Kabupaten Purworejo
- a) Jumlah Anggaran : Rp. 14.624.000,-
- b) Realisasi Anggaran : Rp. 13.364.200,-
- c) Kinerja Anggaran : 91,39 %
- d) Rencana Output : Data Informasi dan Rekomendasi Perizinan SDM dan Air Tanah.
- e) Realisasi Output : Tersajinya Data Informasi dan Rekomendasi Perizinan SDM dan Air Tanah.
- f) Kinerja Output : 96 %
- g) Permasalahan : Perizinan terkait dengan ESDM dan Air Tanah merupakan kewenangan Provinsi sehingga Kegiatan ini hanya berupa Fasilitas / Koordinasi dengan Provinsi / Pusat sesuai jumlah perizinan yang diterbitkan Provinsi / Pusat (jumlah izin tidak dapat diprediksi).
- h) Solusi : Penyesuaian pada perencanaan tahun berikutnya.

g. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan

22) Pelayanan Perizinan

- Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
- a) Jumlah Anggaran : Rp. 336.999.900,-

- b) Realisasi Anggaran : Rp. 333.322.692,-
 - c) Kinerja Anggaran : 98,91 %
 - d) Rencana Output : Pelaksanaan Pelayanan 33 jenis Perizinan
 - e) Realisasi Output : Terlaksananya pelayanan 33 jenis Perizinan
 - f) Kinerja Output : 100 %
 - g) Permasalahan : -
 - h) Solusi : -
- 23) Intensifikasi Pelayanan Perizinan
- Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
 - a) Jumlah Anggaran : Rp. 156.810.000,-
 - b) Realisasi Anggaran : Rp. 148.416.800,-
 - c) Kinerja Anggaran : 94,65 %
 - d) Rencana Output : Pelaksanaan Intensifikasi Pelayanan Perizinan 16 kecamatan.
 - e) Realisasi Output : Terlaksananya Intensifikasi Pelayanan Perizinan 16 kecamatan.
 - f) Kinerja Output : 100 %
 - g) Permasalahan : -
 - h) Solusi : -
- 24) Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi SIM Perizinan
- Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
 - a) Jumlah Anggaran : Rp. 140.450.000,-
 - b) Realisasi Anggaran : Rp. 138.206.000,-
 - c) Kinerja Anggaran : 98,4 %
 - d) Rencana Output : Pemeliharaan Aplikasi dan Peningkatan Sistem Informasi Perizinan.
 - e) Realisasi Output : Terpeliharanya Aplikasi dan Peningkatan Sistem Informasi Perizinan.
 - f) Kinerja Output : 100 %
 - g) Permasalahan : -
 - h) Solusi : -
- 25) Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
- Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
 - a) Jumlah Anggaran : Rp. 28.315.000,-
 - b) Realisasi Anggaran : Rp. 26.527.500,-
 - c) Kinerja Anggaran : 93,69 %
 - d) Rencana Output : Penyelenggaraan Rapat Sosialisasi tentang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 1 kali
 - e) Realisasi Output : Terselenggaranya Rapat Sosialisasi tentang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 1 kali
 - f) Kinerja Output : 100 %

- g) Permasalahan : ATK dapat bantuan dari BPJS sehingga tidak direalisasikan.
- h) Solusi : Penyesuaian pada Perencanaan tahun berikutnya.
- 26) Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perizinan
- Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
 - a) Jumlah Anggaran : Rp. 19.399.800,-
 - b) Realisasi Anggaran : Rp. 6.602.000,-
 - c) Kinerja Anggaran : 34,03 %
 - d) Rencana Output : Penyediaan Data Informasi dan Rekomendasi Hasil Monev, Layanan Pengaduan sejumlah 1 dokumen.
 - e) Realisasi Output : Tersedianya Data Informasi dan Rekomendasi Hasil Monev, Layanan Pengaduan sejumlah 1 dokumen
 - f) Kinerja Output : 34%
 - g) Permasalahan : Pengisian Jabatan Struktural baru terisi pada bulan Juni 2017 sehingga pelaksanaan Monev belum maksimal.
 - h) Solusi : Konsolidasi dilaksanakan awal tahun 2018.
- 27) Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan Satu Atap
- Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
 - a) Jumlah Anggaran : Rp. 53.305.900,-
 - b) Realisasi Anggaran : Rp. 52.564.000,-
 - c) Kinerja Anggaran : 98,61 %
 - d) Rencana Output : Penyediaan Klinik Investasi 1 ruang lengkap.
 - e) Realisasi Output : Tersedianya Klinik Investasi 1 ruang lengkap.
 - f) Kinerja Output : 100 %
 - g) Permasalahan : -
 - h) Solusi : -

h. Program Peningkatan Promosi Investasi

- 28) Promosi dan Kerjasama Investasi
- Lokasi Kegiatan : Purworejo
 - a) Jumlah Anggaran : Rp. 317.499.800,-
 - b) Realisasi Anggaran : Rp. 269.872.682,-
 - c) Kinerja Anggaran : 85 %
 - d) Rencana Output : Pelaksanaan Promosi CJIBF 1 kali, pelaksanaan Pameran di Jateng 2 kali, Temu Investor 1 kali.
 - e) Realisasi Output : Terlaksananya Promosi CJIBF 1 kali, pelaksanaan Pameran di Jateng 2 kali, Temu Investor 1 kali.

- f) Kinerja Output : 100 %
- g) Permasalahan : untuk tenaga penjaga stand dengan pihak ketiga tidak direalisasikan (menggunakan PNS yang ada).
- h) Solusi : Penyesuaian pada perencanaan tahun berikutnya.
- 29) Penyusunan Bahan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal
- Lokasi Kegiatan : Indonesia dan Kabupaten Purworejo
- a) Jumlah Anggaran : Rp. 32.999.800,-
- b) Realisasi Anggaran : Rp. 29.591.600,-
- c) Kinerja Anggaran : 89,67 %
- d) Rencana Output : Penyediaan Bahan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal sejumlah 1 dokumen.
- e) Realisasi Output : Tersedianya Bahan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal sejumlah 1 dokumen.
- f) Kinerja Output : 90 %
- g) Permasalahan : Pengisian Jabatan Struktural baru terisi pada bulan Juni 2017.
- h) Solusi : Penyesuaian pada perencanaan tahun berikutnya.
- 30) Forum Komunikasi PTSP
- Lokasi Kegiatan : Kabupaten Purworejo
- a) Jumlah Anggaran : Rp. 49.998.000,-
- b) Realisasi Anggaran : Rp. 42.785.000,-
- c) Kinerja Anggaran : 85,57 %
- d) Rencana Output : Sinkronisasi PTSP.
- e) Realisasi Output : Terlaksananya Sinkronisasi PTSP 1 kali.
- f) Kinerja Output : 86 %
- g) Permasalahan : undangan untuk menghadiri Forum PTSP Pusat tahun 2017 tidak ada.
- h) Solusi : Penyesuaian pada perencanaan tahun berikutnya.
- 31) Pembuatan Audio Visual Potensi dan Profil Investasi
- Lokasi Kegiatan : Kabupaten Purworejo
- a) Jumlah Anggaran : Rp. 69.992.000,-
- b) Realisasi Anggaran : Rp. 65.970.000,-
- c) Kinerja Anggaran : 94,25 %
- d) Rencana Output : Penyediaan Potensi dan Profil Investasi (Audio Visual) 1 unit
- e) Realisasi Output : Tersedianya potensi dan profil Investasi (Audio Visual) 1 unit
- f) Kinerja Output : 100 %
- g) Permasalahan : Sisa tender.
- h) Solusi : -

Capaian kinerja Program dan kegiatan tahun 2017 rata – rata mencapai 97,71%. Tingkat capaian tersebut berdasarkan realisasi program dan kegiatan dengan target kinerja yang telah direncanakan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

a. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut :

a.1 Tugas, Fungsi

Tugas Pokok:

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah bidang penanaman modal dan pelayanan administrasi perizinan terpadu sesuai dengan kewenangan Daerah yang meliputi penanaman modal, perizinan dan data, sistem informasi dan pelayanan pengaduan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :

a.1 Fungsi

- a. perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal dan pelayanan administrasi perizinan terpadu yang meliputi penanaman modal, perizinan dan data, sistem informasi dan pengaduan;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja bidang penanaman modal dan pelayanan administrasi perizinan terpadu yang meliputi penanaman modal, perizinan dan data, sistem informasi dan pengaduan;
- c. pembinaan dan pengendalian teknis bidang penanaman modal dan pelayanan administrasi perizinan terpadu yang meliputi penanaman modal, perizinan dan data, sistem informasi dan pengaduan;
- d. koordinasi pelaksanaan kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain yang berhubungan dengan bidang penanaman modal dan

- pelayanan administrasi perizinan terpadu yang meliputi penanaman modal, perizinan dan data, sistem informasi dan pengaduan;
- e. penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang penanaman modal dan pelayanan administrasi perizinan terpadu yang meliputi penanaman modal, perizinan dan data, sistem informasi dan pengaduan;
 - f. penyelenggaraan kesekretariatan DINPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu);
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo melayani beberapa perizinan sesuai dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Beberapa Jenis Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo.

Ada 93 (sembilan puluh tiga) Perizinan yang dilayani yaitu :

NO	NAMA IZIN
1	IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL
2	IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL
3	IZIN PRINSIP PERUBAHAN PENANAMAN MODAL
4	IZIN PRINSIP PENGABUNGAN PENANAMAN MODAL
5	IZIN USAHA PENANAMAN MODAL
6	IZIN USAHA PERLUASAN PENANAMAN MODAL
7	IZIN USAHA PERUBAHAN PENANAMAN MODAL
8	IZIN USAHA PENGGABUNGAN PENANAMAN MODAL
9	IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
10	IUJK (IZIN USAHA JASA KONTRUKSI)
11	IZIN PENYAMBUNGAN JALAN DENGAN JALAN UMUM
12	IZIN PEMAKAIAN TANAH PENGAIRAN DENGAN LUAS SAMPAI 1000 M
13	IZIN LOKASI
14	IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON FORMAL
15	IZIN USAHA INDUSTRI
16	IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI
17	IUKI (IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI)
18	IPUKI (IZIN PERLUASAN USAHA KAWASAN INDUSTRI)

19	LPK (IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA)
20	IMTA (IZIN MEMPERKERJAKAN TENAGA KERJA ASING)
21	IZIN USAHA PERDAGANGAN
22	IUP2T (IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL)
23	IUPP (IZIN USAHA PUSAT PEMBELANJAAN)
24	IUTM (IZIN USAHA TOKO MODERN)
25	IZIN OPERASIONAL SIMPAN PINJAM KOPERASI
26	IZIN USAHA PENGGILINGAN PADI
27	IZIN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET
28	IZIN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER
29	IZIN PELAYANAN JASA PARAMEDIK VETERINER
30	IZIN JAGAL HEWAN
31	IZIN PENDIRIAN RUMAH PEMOTONG HEWAN
32	IZIN PENDIRIAN RUMAH PEMOTONG UNGGAS
33	IZIN GANGGUAN
34	IZIN LINGKUNGAN
35	IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE MEDIA LINGKUNGAN
36	B3 (IZIN PENGUMPULAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN)
37	PPLH (IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP)
38	IZIN MEMBAWA BENDA CAGAR BUDAYA KE LUAR DAERAH
39	PKL (IZIN RISET SURVAI PENELITIAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN)
40	LSM (IZIN RISET SURVEI PENELITIAN UNTUK LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT)
41	IZIN REKLAME BERKONTRUKSI
42	IZIN REKLAME NON KONTRUKSI DAN INSIDENTIL
43	IZIN WARUNG INTERNET DAN GAME NET
44	IZIN PENDIRIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
45	IZIN OPERASIONAL PANTI
46	IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN UANG/BARANG
47	IZIN PENGGUNAAN SARANA UMUM
48	IZIN PENGGUNAAN ARSIP YANG BERSIFAT TERTUTUP
49	IZIN TRAYEK ANGKUTAN
50	IZIN USAHA ANGKUTAN
51	IZIN BONGKAR MUAT
52	IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SD SWASTA
53	IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SMP SWASTA
54	IZIN PENDIRIAN PRASARANA OLAH RAGA
55	IZIN PEMAKAIAN/GELANGGANG OLAH RAGA

56	IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
57	PAUD (IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)
58	IZIN/REKOMENDASI KEGIATAN BERKAITAN DENGAN PENDIDIKAN DARI PIHAK LAIN
59	IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT
60	IZIN OPERASIONAL DAN PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT
61	IZIN OPERASIONAL PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
62	IZIN MENDIRIKAN KLINIK
63	IZIN OPERASIONAL KLINIK
64	IZIN KLINIK PELAYANAN HEMODIALISIS
65	IZIN PENYELENGGARAAN RADIOLOGI DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
66	UTD (IZIN PENYELENGGARAAN UNIT TRANSFUSI DARAH)
67	IZIN APOTEK
68	IZIN PENYELANGGARAAN LABOLATORIUM KLINIK UMUM PRATAMA
69	IZIN PENYELANGGARAAN OPTICAL
70	IZIN TOKO ALAT KESEHATAN
71	IZIN TOKO OBAT
72	IZIN PRAKTIK DOKTER UMUM/DOKTER GIGI/DOKTER SPESIALIS/GIGI SPESIALIS
73	SIPA (IZIN PRAKTEK APOTEKER)
74	SIPB DAN SIKIB (IZIN PRAKTIK DAN IZIN KERJA BIDAN)
75	SIPP DAN SIKP (IZIN PRAKTIK DN IZIN PERAWAT)
76	SIKPG DAN SIPP (IZIN PRAKTIK DAN IZIN PERAWAT GIGI)
77	SIKPAN DAN SIPPAN (IZIN PRAKTIK DAN IZIN KERJA PERAWAT ANESTHESI)
78	SIKTTK (IZIN TENAGA KERJA KEFARMASIAN)
79	SIPF DAN SIKF (IZIN PRAKTIK DAN IZIN KERJA FISIOTHERAPIS)
80	SIK-ALM(IZIN PENYELANGGARAAN PRAKTIK AHLI TEGNOLOGI LABOLATORIUM MEDIK)
81	SIK-E DAN SIPE (IZIN KERJA PRAKTIK ELEKTROMEDIS)
82	SIPTGZ DAN SIKTGZ (IZIN KERJA PRAKTIK TENAGA GIZI)
83	SIKTS (IZIN KERJA TENAGA SANITARIAN)
84	IZIN KERJA PEREKAM MEDIS
85	SIKR (IZIN KERJA RADIO GRAFER)
86	SIKRO (IZIN KERJA REFRAKSIONIS OPTISIEN DAN OPTROMETIS)
87	SIKTKT (IZIN KERJA DAN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL)
88	IZIN USAHA MENENGAH OBAT TRADISIONAL
NO	DAFTAR NON PERIZINAN
89	TDP (TANDA DAFTAR PERUSAHAAN)

90	TDG (TANDA DAFTAR GUDANG)
91	TDUP (TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA)
92	STPT (SURAT TANDA TERDAFTAR PENYEHAAT TRADISIONAL)
93	SPP-IRT (SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN-INDUSTRI RUMAH TANGGA)

Dalam melaksanakan pelayanan telah menggunakan SOP (Standar Operasional Prosedur), SPP (Standar Pelayanan Perizinan), maupun SPM (Standar Pelayanan Minimal) sehingga masyarakat pemohon izin dapat mengetahui persyaratan maupun pengurusan perizinan dengan mudah, jelas, transparan dan tepat waktunya.

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berdasarkan kondisi lingkungan strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo, maka untuk menyusun strategi pencapaian visi dan misi, diperlukan analisis lingkungan internal dan eksternal (SWOT Analisis). Lingkungan internal meliputi Kekuatan (Strengths) dan Kelemahan (*Weaknesses*). Lingkungan eksternal meliputi Peluang (*Opportunity*) dan Ancaman (*Threats*). Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

KEKUATAN (S):

1. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo.
2. Kerjasama SDM di Internal DPMPTSP yang cukup baik;
3. Adanya Peraturan Bupati Purworejo Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Beberapa Jenis Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo;
4. Tersedianya Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu (e-permit);
5. Tingginya komitmen pimpinan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

KELEMAHAN (W):

1. Kuantitas dan kualitas SDM masih kurang;
2. Sarana dan prasarana kerja belum memadai;

2. Lingkungan Eksternal**PELUANG (O):**

1. Tersedianya potensi investasi di Kabupaten Purworejo;
2. Teknologi informasi berkembang pesat;
3. Operasionalisasi pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayananan Terpadu Satu Pintu sangat diharapkan oleh masyarakat;
4. Dukungan dari DPRD Kab. Purworejo dan Pemerintah Pusat dalam mewujudkan pelayanan prima.

ANCAMAN (T):

1. Adanya persaingan pelayanan investasi dengan daerah lain;
2. Koordinasi antar instansi Teknis dalam pemberian Perizinan belum optimal;
3. Masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang Mekanisme dan tata cara pemberian perizinan di DPMPTSP Kab. Purworejo;
4. Adanya pungutan liar yang diakibatkan karena masyarakat tidak mengurus langsung perizinan di DPMPTSP (menggunakan jasa pihak ketiga);
5. Peraturan tingkat pusat sering berganti dan tidak konsisten.

2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD

Bahwa dalam proses penyusunan rancangan awal RKPD, hasil indentifikasi permasalahan menjadi konsep rumusan program dan kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dengan menganalisa kebutuhan OPD kemudian dipilah antara program dan kegiatan yang sifatnya wajib, prioritas dan rutin.

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayananan Terpadu Satu Pintu dalam menyusun rancangan awal RKPD sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Ada beberapa Kebijakan Nasional yang menjadi perhatian dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya seperti:

- Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah undang – undang yang mengatur tentang prinsip- prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan atau korporasi yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, mengurangi kemiskinan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik;
- Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

Tujuan dan Sasaran Renja OPD.

Tujuan

Adapun tujuan Renja adalah sebagai arah dan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun sesuai Tugas Pokok dan Fungsi OPD.

Sasaran

Terciptanya pelayanan yang berkualitas, berdaya saing dan sesuai Standar Pelayanan Minimum (SPM).

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Pelayanan Perizinan tertuang dalam Misi Bupati terpilih yaitu menuju masyarakat Purworejo yang lebih sejahtera dengan meningkatkan kemandirian serta daya saing, melalui penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan kemasyarakatan yang aspiratif bertumpu pada agribisnis, yang didukung birokrasi professional dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta peran aktif sektor swasta dan masyarakat pada umumnya.

Peningkatan pelayanan perizinan dapat diukur dari capaian kinerja layanan berdasarkan peningkatan jumlah izin yang dikeluarkan setiap tahun dan Indeks Kepuasan Konsumen (IKM) yang meningkat.

Dari penjelasan tersebut diatas dapat dirumuskan program dan kegiatan yang direncanakan untuk tahun 2019 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat;
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c. Penyediaan alat tulis kantor;
 - d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 - e. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 - f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan;
 - g. Penyediaan makanan dan minuman;
 - h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
 - i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah;
 - j. Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
 - a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

AC	3 unit
Laptop	4 unit
Printer	2 unit
Scanner	1 unit
PC	1 unit
LCD	1 unit

 - b. Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor

Pemeliharaan gedung kantor	660 m2
Rehab tempat parkir	1 paket

 - c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan Kendaraan roda 4	3 unit
Pemeliharaan Kendaraan roda 2	6 unit

 - d. Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

Jasa	Pemeliharaan	9 unit
Komputer/PC, Laptop, Printer, AC, Proyektor, PABX, Runningtexts, Faxsimile, Fingerprint		

3. Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Non Formal 10 OH

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Penyusunan Pelaporan Keuangan 19 dokumen
 - b. Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan 10 dokumen

5. Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan
 - a. Penyusunan Data Dasar Pembangunan 1 dokumen

6. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
 - a. Pelayanan Perijinan 12 bulan
 - b. Intensifikasi Pelayanan Perizinan 16 kecamatan (2 kali)

- c. Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi SIM Perizinan 12 bulan
 - d. Monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan 1 dok
 - e. Pengkajian dan Penyusunan Regulasi Penanaman Modal dan Perizinan 1 dokumen.
7. Program Peningkatan Promosi Investasi
- a. Pengembangan Penanaman Modal 12 bulan, 1 kali
 - b. Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal 12 bulan, 1 kali
 - c. Promosi dan Kerja Sama Investasi 3 kali
 - d. Forum Komunikasi PTSP 12 bulan, 1 kali
8. Program fasilitasi penyelenggaraan energi sumber daya mineral
- a. Fasilitasi sektor sumber daya mineral 1 dokumen

Lokasi / sasaran program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwoerejo Tahun 2019 adalah OPD dan Masyarakat.

Detail Program dan Kegiatan dan Indikator Kinerja dapat dilihat Pada Matriks Program dan Kegiatan OPD

BAB V

PENUTUP

Tema OPD tahun 2019 adalah Melanjutkan Pembangunan Menuju Masyarakat Purworejo yang lebih sejahtera berbasis Agrobisnis.

Rencana Kerja yang telah ditetapkan perlu disosialisasikan agar semua pihak mempunyai satu persepsi tentang rencana kerja yang telah ditetapkan sehingga pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dapat tercapai hasilnya secara optimal.

Rencana Kerja disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah pada level OPD dan disusun sebagai penjabaran Renstra OPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya yang dikompilasi di tingkat pemerintah Daerah menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten. RKPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Demikian Rancangan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo tahun 2019 disusun untuk memberikan gambaran tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019.

Keberhasilan program dan kegiatan yang ada pada Renja tersebut perlu didukung oleh anggaran, Sumber Daya Manusia yang profesional dan sarana prasarana yang memadai. Semoga Renja yang telah disusun dapat menjadikan pedoman dalam pembangunan khususnya dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo.

Purworejo : Juli 2018
Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purworejo

WIDYO PRAYITNO, S.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19620227 198903 1 007